**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A.Pengertian Organisasi**

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerja sama, orang yang berkerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.Sondang P. Siagian yang dikutip oleh M.Saefuddin (1993:3) dalam bukunya “Organisasi dan Management” mendefinisikan bahwa:

“Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan”

 Sementara itu Gibson, Donelly dan Ivancevich yang dikutip oleh M.Saefuddin (1993:3) dalam bukunya “Organisasi dan Management” berpendapat bahwa ciri khas organisasi tetap sama, yaitu perilaku terarah pada tujuan. Mereka berpendapat:

“Organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih effesien dan lebih effektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama”

 Sesuai mengambil teori di kemukakan oleh Gibson, Donelly dan Ivancevich yang dikutip oleh M.Saefuddin (1993:3) dalam bukunya “Organisasi dan Management” ada keterkaitan antara pengertian organisasi dan management yang di jelaskan oleh para pakar tersebut, sehingga peneliti mengambil pengertian yang di kemukakan oleh para pakar tersebut

**B**. **Pengertian Administrasi**

 Administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang sejak akhir abad yang lalu (abad XIX), tetapi administrasi sebagai suatu seni atau administrasi dalam praktek, timbul bersamaan dengan timbulnya peradaban manusia, sebagai ilmu pengetahuan administrasi merupakan suatu fenomena masyarakat yang baru, karena baru timbul sebagai suatu cabang daripada ilmu-ilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia, dengan membawa prinsip yang universal, akan tetapi dalam prakteknya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia dengan memperhatikan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ilmu administrasi sebagai suatu disiplin ilmiah yang berdiri sendiri.

 Administrasi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata *“ad****”*** artinya intensif dan *“ministrare”* artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif.

Menurut Luther Gulick (1960:21) dalam bukunya

 “*Paper on the Science of Administration*”, mengatakan bahwa: “Administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan”.

 Luther Gulick menyatakan keterkaitan Administrasi dan pelaksanaan kerja, sehingga jelas teori yang di nyatakannya, administrasi harus sesuai dengan kaitan pelaksanaan kerja, dengan berbagai tujuan yang telah di tetapkan. Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tujuan bersama.

**C.Pengertian Administrasi Negara**

 Istilah administrasi Negara ialah terjemahan dari “*Public Administrations”****.*** Istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara (LAN) pad sekitar tahun 1956. jika istilah Public Administration itu di uraikan secara etimologis, maka *“Public”* berasal dari bahasa Latin *“Poplicus”*yang semula dari kata *“Populus”*atau *“People”* dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. *“Administration”*juga berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari kata *“ad”* artinya intensif dan *“ministrare”* artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif

 Jhon M Pfiffner dalam buku “*Public Administration*” yang dikutip oleh Soekarna dalam bunya “Dasar-dasar Manajemen” (1986:13), mengemukakan : “Administrasi Negara adalah pelaksanaan kebijakan Negara yang telah digariskan oleh badan-badan politik yang representaif”

 Pengertian yang dikemukan Jhon M Pfiffner dalam buku “*Public Administration*” yang dikutip oleh Soekarna dalam bunya “Dasar-dasar Manajemen” bahwa :

“ Administrasi Negara yang di maksud untuk menerapkan kebijakan yang telah di rumuskan dalam perencanaan oleh pihak pihak terkait dalam kewenangan negara”

 Berdasarkan pengertian“*Public Administration*” yang dikemukan Jhon M Pfiffner dalam buku “*Public Administration*” maka peneliti mengambil pengertian tersebut tujuan pemikiran sang pakar yang lebih komprehensif dan strategis dalam penyampaian pernyataannya. Di Indonesia Badan Perwakilan Politik yang menetapkan Kebijakan Negara ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai Lembaga Legislatif.

 Leonard D. White dalam buku “*Introduction of the Study of Public Administration*” yang dikutip oleh Sukarna dalam bunya “Dasar-dasar Manajemen” (1986:14), mengemukakan:

“Administrasi Negara terdiri dari semua/seluruh aktivitas/ kegiatan yang brtujuan pemenuhan atau pelaksanaan kebijakan Negara”

 Dimock, Dimock & Koening dalam bukunya“*Public Administration*” yang diterjemahkan oleh Sukarna dalam bunya “Dasar-dasar Manajemen” (1986:14), mengemukakan:

 “Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya”

 Bertolak dari definisi-definisi tersebut di atas, jika dilihat dari sudut ilmu administrasi Negara Eyo Kahya (1996:4) dalam bukunya “Pengantar Ilmu Adminstrasi Negara” mengemukakan bahwa:

“Administrasi negara ialah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh alat-alat Negara untuk melaksanakan atau mewujudkan politik Negara atau politik pemerintah”.

 Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Maka Lloyd D. Musolf dan Harold Seidman dalam tulisan mereka berjudul “*The Blurred Boundaries of Public Administration”*, melihat pada batasan-batasan administrasi publik.

 Hal ini karena bagi mereka tampak bahwa setiap keadaan yang bertambah maju, pemerintah pada semua tingkat memberikan tanggung jawab aktivitas yang penting dan kompleks, namun ada lembaga yang semu (apakah yang bersangkutan termasuk lembaga administrasi pemerintah atau swasta). Kecenderungan ini dicerminkan dalam kegiatan pemerintah mensponsori perusahaan swasta, badan hukum yang tidak mencari keuntungan dan pusat-pusat penelitian kontrak. Untuk itu kita harus melihat kepada siapa *Responsibility* dan *Accountability* disampaikan.

 Gerald. E. Caiden dalam bukunya “*Public Administrations*” memberikan patokan untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut pemerintah adalah dengan melihat tiga hal, yaitu: organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

 Inu Kencana Syafiie (2003:32) dalam bukunya “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi Negara, yaitu:

1. Tidak dapat dielakan (*unavoidable*)
2. Senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*)
3. Mempunyai prioritas (has priority)
4. Mempunyai pengecualian (*has exceptional*)
5. Puncak pimpinan politik (*top management political*)
6. Sulit diukur (*difficult to measure*)
7. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (*more is expected of public administration*)

**D.Pengertian Pengawasan**

Pengawasan menurut VictorSitumorang dan Jusuf, sebagai berikut: “ Pengawasan setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”

Sedangkan menurut Sondang, “Pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

**E.Pengertian Kepuasan Kerja**

 Pengertian Kepuasan Kerja menurut Keith Davis (1985:96) yang dikutip oleh Mangkunegara, dalam bukunya yang berjudul **“**Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”(2001:117) sebagai berikut :

*“Job satisfaction is the favorableness or unfavorableness with employees view their work.* (kepuasan kerja adalah perasaan meyokong atau tidak menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja)”

Menurut Wexley dan Yuki (1977:98) yang dikutip oleh Mangkunegara, dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”(2001:117) mendefinisikan

*kepuasan kerja is the way an employee feels about his or her job* (adalah cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya).

 Berdasarkan pendapat Keith Davis, Wexley dan Yuki tersebut di atas, Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang meyokong atau tidak meyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karier, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, stuktur organisasi, mutu pengawasan, sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya, antara lain umur, kondisi kesehatan, kemampuan, dan pendidikan.

**E.Pengaruh Pengawasan dalam Kepuasan Kerja**

Pengawasan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan atas berhasil tidaknya suatu organisasi. Sebab pengawasan yang sukses menunjukkan bahwa dalam pengelolaan suatu organisasi berhasil dilaksanakan dengan sukses pula.

 Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan

 Pengawasan akan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai karena tindakan pemimpin dapat menghilangkan rasa kekecewaan pegawai terhadap pekerjaan nya. Pengawasan dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja pegawai, yang dimana para bawahan akan bekerja dengan tanggung jawab, hasil dari kerja tersebut maka para bawahan merasakan kepuasan kerja hasil apa yang telah dicapainya. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan bawahan, interaksi dengan pemimpin dan partisipasi yang melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program kerja.

 Pada umumnya pegawai membutuhkan support dari pemimpin terhadap tugas yang telah diberikan nya, dengan demikian pegawai akan merasakan kepuasan kerja yang telah dihasilkan dari pekerjaan nya. Pemimpin akan memberikan kepercayaan nya terhadap pegawai atas tugas yang diberikan kepada para pegawai, sehingga para pegawai mempunyai tanggung jawab, dan hasil dari tugas yang telah dilaksanakan akan menimbulkan kepuasan kerja pegawai.

 Kemudian peneliti akan kemukan mengenai kepuasan kerja yaitu perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja, artinya apakah pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penilaian keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas nya. Maka Kepuasan Kerja hal yang dapat dilihat dari peranan dan kemampuan pemimpin dalam melakukan pengawasan para pegawainya.

 Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Pengaruh Pengawasan dalam Kepuasan Kerja pegawai sangat erat, hal ini dapat dilihat dengan adanya support, peranan pemimpin dan kemampuan pemimpin yang dapat mengarahkan para pegawainya, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan nya para pegawai merasakan kepuasan kerja atas apa yang telah dicapainya. Untuk mencapai tujuan kepuasan kerja pegawai, pemimpin harus memberikan kepercayaan atas kemampuan yang dimiliki para pegawai nya berdasarkan spesialis yang dijabat oleh para pegawai.